

Menumpang Pesta Kesenian untuk Bienial Yogyakarta



Demo melukis di Pasar Seni FKY X, 1998, Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta

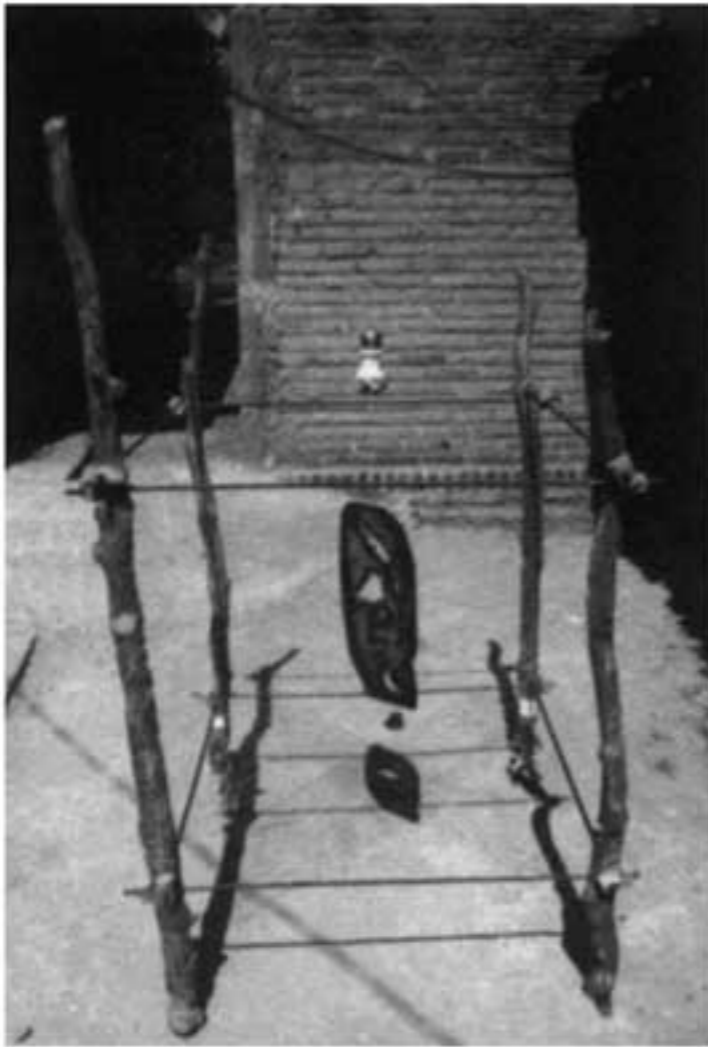
Akhir-akhir ini ada isu besar yang bergaung di dunia seni rupa di Indonesia khususnya beberapa kota pusat seni rupa di Jawa dan luar Jawa. Isu Bienial dan Triennial. Di Jogja bahkan ada beberapa isu "seram" yang seolah-olah akan adalagi pameran Bienial Jogja yang kemudian akan diikuti sebuah triennial. Bahkan, katanya, bersifat internasional. Isu atau bukan, akan terbukti beberapa bulan lagi.

Pameran bienial dan triennial seolah-olah menjadi sebuah obsesi besar praktisi seni rupa di Indonesia. Catatan sejarah menyatakan acara besar ini awalnya dimulai dari sebuah Pameran Besar Seni Lukis yang diadakan di Jakarta pada tahun 1974. Pameran ini kemudian mendapat respon "positif" dari beberapa seniman muda yang menganggap pameran ini adalah etalase seni lukis nasional, yang mereka anggap sebagai "seni resmi" rezim Orde Baru. Perlu diingat pemerintah Orde Baru setelah kemenangannya membutuhkan sebuah bentuk seni yang berbeda dengan seni Orde Lama, untuk keperluan inilah saya kira TIM dibuat. Akan tetapi penolakan terhadap pameran ini justru memberi catatan baru pada sejarah seni rupa Indonesia. Pameran yang ditentang menjadi "tersisihkan" dan pameran berikutnya secara tidak langsung juga menjadi semacam legitimasi negara tentang seni rupa yang "direstui" dan yang "tidak di restui".

Fenomena ini sangat mudah dimengerti karena pada saat itu peranan negara-lewat birokrat seninya-sangat dominan. Praktis seniman yang berjaya pada waktu itu adalah seniman yang membudak pada rezim fasis Orde Baru. Sebagian besar mereka hidup dari proyek negara, atau mengajar di perguruan tinggi seni pemerintah. Bentuk patronase negara itu kemudian menghasilkan bentuk seni yang menggali akar tradisi, bentuk abstrak, dan itu ujung-ujungnya seni rupa yang tidak mau dikaitkan dengan aspek politik: *economical growth yes, politics growth no way*. Dari iklim berkesenian semacam inilah pameran bienial dan triennial ini disemai di Indonesia (lihat *Bienial di Indonesia: Dari Masa Sulit ke Masa Sulit*).

Seperti halnya Jakarta, Jogja pun sempat melaksanakan acara pameran besar yang diberi nama Bienial Jogja. Sejak awal pameran ini menjadi tempat bagi negara melakukan monopoli estetik, artinya mereka melakukan kontrol, baik langsung maupun terselubung, melalui aparatus kesenian yang bekerja untuk negara, dan acara pameran yang mereka organisir menjadi salah satu alat untuk melakukan kontrol. Acara pameran bienial yang paling heboh mungkin terjadi pada tahun 1992. Sebuah acara tandingan dilaksanakan seniman muda. Tujuannya untuk memberi alternatif bagi pameran utama. "Binal experimental art", menjadi suatu pameran "liar" yang mampu memantahkan acara pameran Bienial Jogja. Setelah mendapat tentangan dari seniman muda itu, pada pameran selanjutnya panitia mengubah konsep pameran menjadi lebih terbuka terhadap berbagai kecenderungan baru yang berkembang. Namun, karena cara pelaksanaannya carut marut, tidak pernah ada pameran dua tahunan yang benar-benar diadakan rutin dua tahun. Kini Bienial Jogja yang sudah lama mati tiba-tiba hidup kembali.

Bagaimana pameran berkala di negara lain berlangsung? Satu hal yang mendasar pameran berkala di negara lain tidak diperlakukan hanya sebagai peristiwa kesenian semata. Lihatlah pameran *Documenta* di Kasel,



Hedi Haryanto,
Gonjang-Ganjing,
90 x 90 x 160 cm, instalasi 1998,
dalam Bienal Seni Rupa Yogyakarta 1999

Jerman, misalnya. Pameran ini merupakan upaya sistematis pekerja seni di Jerman untuk membentuk watak "Jerman Baru" yang berbeda dengan "Jerman Lama" yang dihantui dengan *holocaust*. Atau katakanlah Asia Pacific Triennale di Brisbane, Australia, yang merupakan strategi politik dan ekonomi untuk menempatkan Australia sebagai salah satu pusat seni rupa di wilayah Pasifik dan Asia. Sekaligus juga menggiring kurator dan *dealer* seni internasional untuk datang menengok *terra incognita* seni rupa berkelas internasional di Australia. Jadi semua merupakan upaya sistematis yang direncanakan secara baik dan melibatkan banyak pihak: pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, seniman lokal, seniman internasional, galeri, museum, sekolah dan lembaga seni, serta dunia seni internasional. Dari dua perbandingan tadi, seperti apakah Bienal Jogja itu seharusnya di bentuk?

Jogja mempunyai tradisi seni yang cukup kuat. Tradisi itu membuat masyarakat di Jogja cukup mau menerima "keanehan". Saya pikir ini sebuah modal apresiasi potensial. Selain kemauan menerima hal yang aneh, penduduk Jogja juga terbiasa menyaksikan pameran, setidaknya pameran kerajinan atau mungkin pameran seni lukis. Pendek kata untuk beberapa jenis seni tertentu, masyarakat Jogja cukup "terdidik". Hal ini menunjukkan Jogja setidaknya memiliki masyarakat penyangga yang akan menonton acara seni yang paling aneh sekalipun. Tak heran proyek "Mural Kota" yang diorganisir kelompok Apotik Komik justru mendapat restu dari Pemerintah Kota Jogja. Hebatnya, sejauh ini belum ada corat-coret grafiti yang merusak karya mural yang menghiasi sejumlah tembok kota. Masyarakat seperti ini mungkin akan sulit ditemui di kota lain, bahkan di Jakarta sekalipun yang sempat dihiasi mural di beberapa tempat, tetapi masyaallah, justru apparatus Pemda DKI yang menghapusnya.

Selain faktor masyarakat penyangga, di Jogja juga terdapat banyak lembaga kesenian non pemerintah yang dikelola secara mandiri. Lembaga kesenian itu tak hanya mampu menyediakan sumber seniman tetapi juga SDM handal di bidang pengelolaan acara. Meskipun mereka jarang



Karya Januri,
Proyek Apotik Komik,
"Sama-Sama, Mural Kota
2002,"
Jembatan Layang,
Lempuyangan,
Yogyakarta

melakukan hubungan dengan lembaga kesenian pemerintah, tetapi saya pikir mereka akan dengan senang hati mau membantu jika diminta. Satu lagi modal Jogja adalah adanya acara tahunan yang telah berlangsung untuk kesekian kalinya yaitu Festival Kesenian Yogyakarta (FKY). Acara ini unik. Meski dikelola secara akrobatik, tetapi hingga kini panitia mampu menjaga konsistensi penyelenggaraan FKY pada setiap awal Juni hingga awal Juli setiap tahun. Lebih penting lagi FKY menjadi agenda tetap di seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapat dukungan dana dan fasilitas dari Pemda provinsi, kota, dan kabupaten. Di kota Jogja, FKY menjadi *city event program* yang berhasil menyedot keterlibatan emosional kalangan seniman maupun penduduk kota. Setiap tahun penduduk Jogja berharap kedatangan FKY. Ribuan penduduk pun membanjiri Jalan Malioboro untuk menyaksikan acara pembukaan FKY, yang pelaksanaannya dengan cerdas ditetapkan pada saat liburan panjang oleh Dewan Kesenian Yogyakarta sebagai motor penyelenggaraan FKY. Publikasi yang berisi informasi tentang waktu dan tempat setiap acara FKY selama sebulan penuh tersebar luas. Supir taksi, tukang becak, kusir andong dengan mudah mengantar turis luar kota ke arena FKY.

Berbeda dengan Pameran Bienal Jogja, kuratorial pameran seni rupa FKY memang tidak ketat dan cenderung hanya bersifat formal. Sifat pesta kesenian pada FKY membuka lebar-lebar ruang pintu pameran untuk seniman siapa saja yang ingin berpartisipasi. Akan tetapi sebetulnya Bienal Jogja dapat menggunakan FKY untuk menitikkan programnya. Sebuah pameran yang tertata baik dan terkurasi dengan jernih di sebuah festival seni dan pasar kerajinan dengan penonton yang berjumlah ribuan akan menguntungkan seniman dan masyarakat penyangganya. Menggabungkan kedua acara itu adalah cara yang cukup realistis, karena dana dan sumber daya manusianya dapat dimaksimalkan dan hasilnya dapat dirasakan langsung. Jika saja itu terjadi, maka bienal yang selama ini hanya dimiliki oleh seniman dan medan seninya akan juga turut dimiliki oleh tukang becak, supir taksi, pedagang kaki lima yang akan membuat kopian souvenir pameran, dan orang-orang "normal" lainnya. Sehingga pameran "yang sakral dibumikan", karya seni rupa yang mengusung tema besar akan dinilai langsung oleh penonton awam yang menjejali ruang pameran dengan segala keingin-tahuannya. Festival Kesenian Yogyakarta dan Bienal Jogja pun punya wajah baru: tak cuma sekedar pesta, tetapi juga tak cuma sekedar event kesenian yang hanya dinikmati seniman.

Peran dan fungsi negara pada *event* besar semacam FKY dan bienal bisa dijadikan model bagi kegiatan sejenis. Secara ideal negara adalah penengah yang mewakili berbagai kepentingan. Sebuah acara pameran dua tahunan dan berskala besar yang hanya semata-mata dikelola oleh swasta akan menyebabkan benturan kepentingan yang tidak terelakkan. Pekerja seni juga harus berperan dalam penguatan negara dalam aspek ini. Akan tetapi tentu saja bukan berarti menempatkan kembali negara sebagai penguasa tunggal yang menentukan segalanya, melainkan mengembalikan fungsi negara sebagai mediator berbagai kepentingan. Di saat yang sama penguatan peran swasta, perusahaan maupun perseorangan, juga harus tetap dilakukan.

Kesenian menjadi terlampau sederhana jika hanya diurus negara saja, dan negara terlampau sederhana jika hanya mengurus kesenian saja.

*) perupa yang menetap di Yogyakarta